

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Amiruddin dan Zainal Askin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Riyanto. 2016. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Negara*. Yogyakarta: BPFE.
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, 2010, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Fokusmedia, Bandung.
- Doli D. Siregar. 2004. *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Doli Siregar, 2024, *Manajemen Aset*, PT Gramedia, Jakarta.
- George Terry, 1974, *Principles of Management*, Richard D. Irwin Inc, Illinois, 1974.
- H Simamora, 2015, *Manajemen Publik: Teori dan Praktik di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Handoko, 2003, *Manajemen*, BPFE, Yogyakarta.
- Hariyono, 2023, *Modul Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah*, Pusdiklat Keuangan Umum.
- Hotma Siallagan, *Hukum Keuangan Negara dan Pengelolaan Barang Milik Negara*, USU Press, Medan.
- Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), 2024, *Laporan Kinerja 2020–2024*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mardiasmo, 2021, *Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet. Ix, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2019, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- R Subekti, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soemitro, 1994, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumeetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiana, A. Gima. 2013. *Manajemen Aset Pariwisata: Pelayanan Berkualitas agar Wisatawan Puas dan Loyal*. Bandung: Guardaya Intimarta.
- UNDP, 2023, *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*, Development Programme, New York.
- W.Riawan Tjandra, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Atma Jaya University Press, Yogyakarta.
- World Bank, 2018, *Public Asset Management Reform in Developing Countries*, World Bank Press, Washington, D.C.
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah

- Bayu Prakoso, 2022, *Optimalisasi Aset Negara Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN): Analisis Hukum dan Kelembagaan*. *Jurnal Keuangan Publik dan Administrasi Negara*, Vol. 5, No. 1.
- Boris Satriyo Utomo dan Dwi Martani. 2023. "Optimalisasi Barang Milik Negara: Penelitian Konsep Capital Charge Dalam Perspektif Peningkatan Efisiensi Penggunaan Aset Pemerintah." *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 13, No. 3, hlm. 789–803.
- Cut Intan, 2023, Problematika Pengelolaan Aset Eks PT Arun di Lhokseumawe: Perspektif Hukum Keuangan Negara, *Jurnal Ilmu Hukum Samudra*, Vol. 4 No. 2.
- D Yuliani, 2021, Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 12, No. 2.
- Dhimas Aditya Pratama Putra, Laily Nurhayati, dan Abdul Rahman. 2026. "Strategi Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara Idle pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara." *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, Vol. 9, No. 2, hlm. 145–148.
- Dwi Suryadi, 2022, Good Governance dalam Pengelolaan Barang Milik Negara, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12 No. 1.

F Siallagan, 2021, Reformasi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Tantangan Dualisme Kelembagaan di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 9 No. 2.

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), 2024, *Laporan Kinerja 2020–2024*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Nasrudin, 2015, *Efektivitas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) terhadap Pengelolaan Aset Negara*, *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Vol. 13, No. 2.

PT Perta Arun Gas, 2023, *Laporan Tahunan dan Rencana Pengelolaan Aset Eks PT Arun 2023*.

Rina Oktaviani dan Agus Setyawan. 2023. “Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Perspektif Efisiensi Aset Pemerintah.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, Vol. 9, No. 2, hlm. 112–118.

Siti Nurhayati. 2024. “Analisis Idle Asset pada Pengelolaan Aset Pemerintah dan Strategi Optimalisasinya.” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 10, No. 1, hlm. 33–40.

Widi Widayat dan Neneng Sri Rahayu. 2026. “Strategi Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berupa Properti Umum pada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 7, No. 3, hlm. 2070–2082.

Y. S. Putra dan L. Handayani. 2022. “Strategi Pengelolaan Aset Pemerintah Berbasis Kolaborasi Stakeholder.” *Jurnal Governance*, Vol. 8, No. 3, hlm. 201–207.

Yayan Sopyan. 2023. “Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara melalui Inovasi Sistem Informasi dan Kerangka Regulasi.” *Eks-Accuracy: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, hlm. 2–5.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2024 Tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia, PERMENKEU Nomor 219/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Republik Indonesia, PERMENKEU nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN.

D. Website dan Putusan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). 2021. *Modul Pengelolaan Barang Milik Negara*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). 2023. *Laporan Pengelolaan Aset Negara dan Tantangannya*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 Tentang Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam.